

EFEKTIVITAS ORGANISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

oleh: M Dzikron AM. *, Reza Nasrullah ,dan Dewi Shofi M.

*Jurusan Teknik Industri Unisba, Bandung

Abstrak

Pengelolaan zakat maal oleh lembaga amilin memiliki sasaran untuk pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas pencapaian sasaran, maka penilaian kinerja organisasi menjadi penting terutama kepada lembaga yang memanfaatkan dana publik (ZIS). Organisasi pengelola ZIS sebagai bagian dari system social harus bertanggung jawab untuk melakukan manajerial sesuai misi yang diembannya. Sejalan dengan alasan diatas, keberadaan lembaga pengelola zakat di wilayah kerja Bandung dan se-Jawa Barat perlu dievaluasi terhadap parameter efektivitas organisasi (Organizational Effectiveness). Sehingga dapat diketahui efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperolehnya.

Kata kunci: organisasi, pemberdayaan, efektif

1. Pendahuluan

Menjelang tahun 2000-an lahir berbagai organisasi pengelola **zakat maal**, disebut juga lembaga amil zakat (LAZ) untuk menghimpun dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS). Organisasi baru ini antara lain: Dompot Dhu'afa Republika, Dompot Sosial Ummul Quro', Dompot Peduli Ummat, dan lain-lain. Masing-masing organisasi menyadari besarnya potensi dana¹ di masyarakat. Dalam perkembangannya, organisasi ini juga bersaing dengan perbankan seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS, BMT), serta bersaing pula dengan organisasi media Koran/televisi dalam pengumpulan "dana kemanusiaan pembaca/pemirsa".

Pada satu sisi kemunculan organisasi ini disyukuri sebagai langkah aktif, mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun pada sisi lain keberadaan organisasi perlu dievaluasi apakah telah efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan kepada masyarakat? Lembaga pengelola ZIS memiliki tujuan utama untuk menyalurkan bantuan kepada delapan kelompok asnaf (QS. At Taubah: 60) Delapan kelompok sasaran ini termasuk fakir miskin yang banyak terlantar di jalanan di seluruh Indonesia. Agar suatu bantuan ZIS dapat mencapai sasaran, organisasi harus memiliki mekanisme kerja yang professional dan transparan, prinsip transparansi diterapkan untuk menghindari penyimpangan.

¹ Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Didin Hafiduddin, MSc menyebutkan potensi zakat maal (ZIS) Rp 7 Triliun, sedang laporan LAZ Nasional untuk tahun 2000 terkumpul dana Rp 270 Miliar (Republika, 4 Desember 2001)

2. Permasalahan

Penilaian kinerja organisasi menjadi penting terutama kepada lembaga yang memanfaatkan dana publik (ZIS). Organisasi pengelola ZIS sebagai bagian dari system social harus bertanggung jawab untuk melakukan manajerial sesuai misi yang diembannya. Sejalan dengan alasan diatas, keberadaan lembaga pengelola zakat di wilayah kerja Bandung dan se-Jawa Barat perlu diteliti terhadap parameter efektivitas organisasi (*Organizational Effectiveness*). Sehingga dapat diketahui efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperolehnya.

3. Tujuan Pentingnya Manajemen Zakat Profesional

Secara umum, kondisi kemiskinan ekonomi melanda rakyat Indonesia terutama sejak krisis ekonomi 1997 sampai kini. Aktivitas perekonomian cenderung melemah, ditandai bertambahnya jumlah pengangguran serta penurunan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu disusun kebijakan ekonomi yang tepat bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Perekonomian Islami menjadi suatu kebutuhan, seperti munculnya berbagai perbankan *bernuansa syari'ah* (Bank Muamalat/BPRS/BMT dan lain-lain) serta tumbuhnya lembaga independen pengelola zakat maal.

Pemberdayaan ekonomi umat terus dilakukan. Lembaga-lembaga Islam berupaya agar perekonomian Islami menjadi alternatif utama. Hal ini untuk menghindarkan segala praktek keuangan yang bersifat ribawi, selain itu pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berasal dari umat Islam harus dikelola secara efektif. Sumber dana ZIS merupakan modal dalam peningkatan kesejahteraan umat. Zakat sebagai rukun iman ketiga, di samping berfungsi ibadah juga berfungsi sosial sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Potensi ZIS bila dikelola dengan baik Insya' Allah mampu mengatasi atau mengurangi jumlah kemiskinan umat. Karena itu sosialisasi ZIS melalui pengelolaan yang professional harus dilakukan.

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* (terjemahan 1993, hal 257) zakat mengandung enam prinsip, yaitu: (1) Prinsip ketaatan (*faith*); (2) Prinsip Pemerataan keadilan (*equity*); (3) Prinsip Produktif (*productivity*); (4) Prinsip nalar ilmiah (*reason*); (5) Prinsip Kemerdekaan (*freedom*); dan (6) Prinsip kemudahan (*ethic*). Prinsip (2), (3) dan (4) menggambarkan perlunya manajemen zakat, dimana masing-masing amilin dituntut mengoptimalkan pengelolaan dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme sehingga terselenggara organisasi yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Pengukuran kinerja manajemen dilakukan dalam analisis organisasi dalam model input-proses-output (Manajemen industri). Dalam hal akses sumberdaya (input), masih banyak hal yang dapat dilakukan seperti dukungan informasi database muzakki yang potensial. Demikian

pula mekanisme proses harus diselenggarakan secara lancar, dan transparan. Sedang aspek pemanfaatan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan sehingga mampu merubah status mustahik menjadi lebih sejahtera, hal ini berlaku khususnya untuk zakat fungsi produktif.

Berikutnya, hal yang tidak kalah penting adalah laporan pertanggungjawaban pengumpulan dan pemanfaatan yang mudah dibaca oleh muzakki. Laporan ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan, sekaligus sebagai media silaturahmi antara pengelola organisasi/amilin, muzakki, dan para mustahik.

Sasaran Zakat untuk Fungsi Ekonomi Produktif

Pemanfaatan zakat² bertujuan: (1) Mengangkat derajat fakir miskin dari penderitaan ekonomi; (2) Membantu para ghorimin, Ibnu Sabil mengurangi beban hidupnya; (3) Membina solidaritas social; (4) Menghilangkan sifat kikir, sombong dari para pemilik harta; (5) Mengatasi kesenjangan social; serta (6) Sarana mencapai keadilan pemerataan pendapatan.

Disamping itu, terdapat alternatif pendayagunaan zakat maal untuk fungsi produktif atau pengembangan usaha mikro (kecil). Pelaku usaha yang skala usahanya belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak, termasuk ke dalam kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat. Jika dana tambahan untuk mengembangkan usahanya masih tersedia di lembaga amilin (sisa infak dan sedekah cukup banyak) maka bantuan dana usaha diperbolehkan.

Dengan demikian tinjauan secara ideologis maupun praktis manajerial memperlihatkan bahwa potensi zakat maal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian. Pengembangan perekonomian untuk alternatif fungsi produktif dalam pengembangan usaha kecil. Sekiranya upaya ini dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai organisasi seperti jama'ah masjid, baitul maal, dan kelompok pengusaha Muslim, maka akan lebih berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya.

4. Metode Analisis Efektivitas Organisasi

Terhadap besarnya potensi ZIS dan besarnya harapan masyarakat, maka keberadaan organisasi perlu dievaluasi apakah lembaga-lembaga tersebut telah mewakili kepentingan masyarakat dalam memberi bantuan sosial serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan memberi penjelasan seberapa efektif penyelenggaraan organisasi ZIS selama ini. Hasil penelitian bermanfaat untuk mengkaji prospek pemanfaatan ke depan dalam program pemberdayaan ekonomi.

² Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, 1988

Mengingat luasnya permasalahan, penelitian dibatasi dalam lingkup:

- 1 Organisasi ditinjau dalam analisis industrial: model input-proses-output, berdasar parameter perolehan sumber (*input*), mekanisme manajemen (*proses*) dan pencapaian tujuan (*output*).
- 2 Penelitian efektivitas difokuskan pada aspek teknis manajerial sehingga tidak membahas konsep fikih zakat yang telah dianut oleh masing-masing organisasi.
- 3 Survei organisasi (*purposif sampling*) kepada lembaga pengelola ZIS di wilayah kota Bandung yang dianggap cukup mewakili karakteristik se-Jawa Barat.

Parameter Efektivitas Organisasi

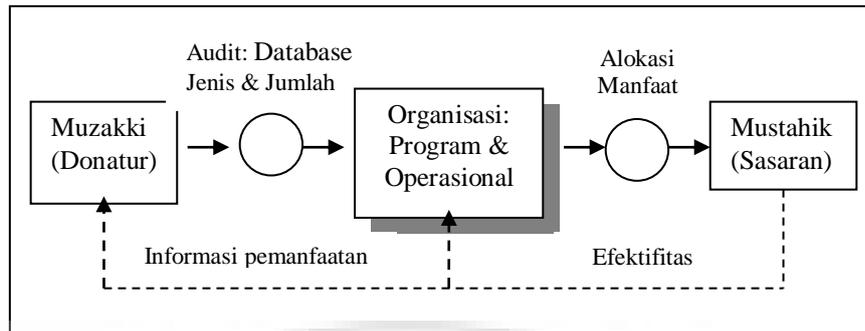
Pengertian efektivitas organisasi adalah kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan di masa depan, tujuan berupa: seberapa besar sasaran telah dicapai. Sehingga efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan bila tujuan dalam acuan sasaran (standar) belum ditetapkan, maka kinerja organisasi sulit untuk diukur tingkat efektivitasnya. Prinsip efektivitas sebenarnya merupakan konsep yang luas, melibatkan seluruh aspek internal dan eksternal. Sedang prinsip efisien mengikuti prinsip efektivitas dengan sifat yang terbatas pada aspek internal saja, sehingga efisiensi adalah banyaknya input yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output (rasio I / O).

Efektivitas merupakan konsep yang penting dalam teori organisasi, karena ia memberi gambaran menyeluruh tentang upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Tetapi pengukuran efektivitas bukanlah hal sederhana bagi organisasi berukuran besar dan memiliki banyak bagian. Dalam organisasi berukuran besar dengan berbagai bagian (departemen) yang memiliki fungsi berbeda-beda, seperti sasaran bagian keuangan berbeda dengan sasaran bagian humas, dan berbeda pula dengan sasaran bagian produksi. Hal ini cukup menyulitkan dalam mengukur efektivitasnya secara keseluruhan. Selanjutnya metodologi dalam mengukur efektivitas organisasi³ dapat dikembangkan dari skema dasar input-output dalam sistem organisasi industri.

Penelitian “*Efektivitas Organisasi Zakat Maal dalam Program Pemberdayaan Ekonomi*” bersifat deskriptif-eksplanasi. Model analisis organisasi dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

³ SB Hari Lubis, *Pengantar Teori Organisasi*, Theta Iota, Bandung, 1992.

Manajemen Organisasi zakat:



Gambar 1. Model Manajemen Zakat Produktif oleh M. Dzirkon

Model Manajemen Organisasi zakat⁴ dalam Gambar 1 menjelaskan bahwa organisasi ZIS harus memiliki keterpaduan dengan semua entitas terkait, dan mekanisme manajerial harus mengarah pada terselenggaranya aktivitas kerja yang lancar, transparan dan terukur secara efektif dalam mencapai sasaran. Selanjutnya untuk melengkapi semua pendekatan diatas, pengukuran efektivitas lebih akurat bila dilakukan dengan pendekatan gabungan, yaitu mencakup penerapan ketiga pendekatan secara simultan. Dengan demikian dalam pendekatan ini diharapkan mampu memberi gambaran menyeluruh tentang dimensi manajerial organisasi.

Sampel penelitian meliputi lima lembaga amil zakat yang telah dikenal di kota Bandung dan sekitarnya, yaitu:

Tabel 1. Daftar Sampel Organisasi

Nama Lembaga	Badan Hukum	Wilayah Operasi
Badan Amil Zakat JABAR (BAZ)	SK. Gubernur Jawa Barat	JABAR, sejak 1974
Dompot Du'afa Republika (DD)	LAZ, 2002 SK Gub	JABAR, sejak 2000
Dompot Peduli Ummat-Daarut Tauhid (DPU)	LAZ, 2002 SK Gub	JABAR, sejak 1998
Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ)	LAZ, 2002 SK Gub	JABAR, sejak 1998
Lembaga Wakat dan Zakat Salman (LWZ)	LAZ (dalam proses, 2002)	JABAR, sejak 1994

Sumber: Data survei, 2002

Keterangan: Masing-masing organisasi beroperasi sejak periode tercantum. Sedang status pengesahan LAZ diperoleh pada tahun 2002 karena adanya kebijakan baru (Ditjen Pajak) tahun 2002 tentang zakat dapat mengurangi setoran pajak, serta berlakunya Undang-undang RI No 38 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Model skema organisasi zakat dimuat dalam jurnal "Zakat dan Masyarakat", Raushan Fikr, 1993.

Mengingat tujuan penelitian bukan untuk membandingkan kinerja satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka urutan sample disusun secara acak. Penyebutan nama organisasi/ lembaga zakat selanjutnya diwakili dengan sebutan Responden, yaitu sebagai R1, R2, R3, R4 dan R5.

5. Data Profil Organisasi

5.1 Perolehan Sumber

Analisis atas kinerja pengumpulan jumlah pemasukan dana ZIS adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kemampuan penggalangan dana periode 2002

Responden*	Potensi Sb. Lingkungan	Jumlah Muzakki	Kategori Muzakki	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengumpulan (Rp)
R1	Belum diukur	--	Belum terkategori	--	2 M
R2	Idem	3.000	Idem	500 juta	300 juta
R3	Idem	--	Idem	--	10 juta
R4	Idem	10.000	Idem	1M	300 juta
R5	Idem	26.000	Idem	--	265 juta

Sumber: data survei tahun 2003. * Nomor responden tidak mencerminkan urutan.

Keterangan:

1. Kondisi lingkungan belum ditaksir seberapa besar potensi dana yang dapat digali.
2. Kategori muzakki individual belum ada pemilahan yang jelas terhadap masing-masing profesi muzakki, demikian pula belum ada prioritas tegas terhadap potensi muzakki tingkat perusahaan.
3. Jenis zakat yang dibayarkan belum ada kategori tegas, seperti zakat profesi, zakat harta/kekayaan atau zakat tabungan, dan lain-lain.
4. Target perolehan umumnya belum tercantum namun ada juga yang mencantumkan targetnya.

5.2 Proses Manajerial Organisasi

Proses manajerial menggambarkan mekanisme kerja organisasi, aspek ini meliputi: visi organisasi, status sumberdaya sarana organisasi, prioritas program, transparansi organisasi dan pelaporan.

Tabel 3. Proses Manajerial LAZ

Resp	Sarana & Fasilitas	Jumlah Staf SDM	Akses ke Muzakki & mustahiq	Sistem Integrasi Data	Pelaporan Reguler	Rincian detail laporan
R1	Baik	40	Semi aktif	MIS	3 bln dua arah	Global
R2	Baik	30	Semi aktif	Komputer Standar	4 bln dua arah	Global
R3	Baik	3	Semi aktif	Komputer Standar	4 bln	Belum
R4	Baik	27	Pasif	MIS	1 bln	Global
R5	Baik	12	Semi aktif	Komputer Standar	3 bln	Global

Sumber: data survei 2003

Keterangan:

1. Sarana dan fasilitas cukup memadai untuk melakukan semua aktivitas kantor .
2. Interaksi kepada muzakki dan mustahiq terkategori semi aktif, muzakki datang akibat promosi media massa. Belum aktif menggaet kepada calon muzakki potensial yang belum tertarik menjadi anggota tetap. Sedang interaksi kepada mustahiq juga kurang aktif, karena sebagian besar calon mustahiq mendatangi kantor lembaga.
3. Sistem pendataan sudah terkomputerisasi namun belum memakai Manajemen Informasi Sistem yang optimal.
4. Format pelaporan bersifat global hanya jumlah umum, belum merinci aspek distribusi manfaat dan monitoring umpan balik apakah si penerima telah lebih sejahtera atau telah berubah menjadi muzakki.
5. Organisasi belum berani menaksir lamanya waktu atas respon perbaikan kondisi setelah pemberian zakat.

5.3 Sasaran Pemberdayaan

Tabel 4. Pendayagunaan zakat: sasaran pemberdayaan

Resp*	Prioritas Pemanfaatan	Jenis Fungsi produktif	Skala dana tersalur	Ukuran perbaikan	Pedoman waktu
R1	Produktif	Pengemb ekonomi masy	Masih dirancang	Perubahan status	Belum ada
R2	Pemerataan	Ekonomi & Pendidikan	Sekedar bantuan	Pertolongan	Belum ada
R3	Produktif	Pendidikan	Proporsional	Lulus sekolah	Lama sekolah
R4	Pemerataan	Pengemb. usaha	Sekedar bantuan	Pertolongan	Belum ada
R5	Pemerataan	Pengemb. usaha	Sekedar bantuan	Pertolongan	Belum ada

Sumber: Data survei, 2003, *Nomor responden tidak bersifat urut dengan daftar sebelumnya

Keterangan:

Perbedaan statemen distribusi dan program pemberdayaan membawa implikasi bahwa masing-masing organisasi memilih prioritas sendiri, ada organisasi yang memprioritaskan program pendidikan, ada yang memprioritaskan pemerataan bantuan dan ada juga yang memprioritaskan pengembangan ekonomi.

6. Analisis Efektivitas Organisasi

6.1 Perolehan Sumber

Prinsip Efektivitas dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk menghimpun semua sumber daya secara maksimal. Sumber Input dapat berupa kuantitas materi maupun kualitas sumber daya manusia, dalam manajemen zakat hal yang dimaksud adalah: Bagaimana organisasi mampu menghimpun sumber dana zakat dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada gambar1, penggalangan sumber input (potensi zakat) belum dilakukan secara efektif kepada terselenggaranya **Audit Jenis dan Jumlah**. Dimana pada kenyataan, pihak manajemen organisasi (LAZ) belum memiliki data potensi tentang sumber zakat yang perlu digali. Sehingga untuk **tingkat efektivitas belum terukur** secara nyata melalui audit inventarisir jenis obyek zakat dan kelompok profesi muzakki (atau potensi zakat perusahaan).

Langkah audit semua sumber potensi zakat kedalam database informasi akan mempermudah dalam menghitung jumlah yang ditargetkan dibanding nilai potensi.

Daftar Potensi zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) yang dapat digali sesuai jenis dan bidang usaha serta berdasar subyek pelaku pribadi/perusahaan adalah:

- Hasil Pendapatan Usaha/Gaji: Perorangan dalam total penghasilan per tahun
- Hasil Produksi: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dan Perkebunan untuk kategori Usaha Rakyat Perorangan, Usaha Negara dan Usaha Swasta Besar.
- Hasil Industri dan Perdagangan, termasuk Hotel dan Pariwisata.
- Hasil Usaha Pertambangan: Emas, Bijih Besi, Minyak Bumi, Gas Alam, dst.
- Produk Bank: Tabungan, Giro dan Deposito.
- Kekayaan Pribadi: Perhiasan, Kendaraan Mewah, serta alat kemewahan lainnya.

Dari daftar potensi: jenis, bidang serta subyek muzaki nilai potensi zakat dalam satuan rupiah belum mampu diukur. Analisis sumber organisasi menunjukkan bahwa upaya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung (Jawa Barat) jauh dari memadai, dimana sumber penerimaan belum digarap secara terarah. Secara umum mekanisme audit jenis dan jumlah potensi memiliki kesenjangan, belum tersedia pembagian subyek muzaki pribadi atau perusahaan.

Pada bagian lain terkait dengan potensi Bandung/Jawa Barat sebagai salah satu sumber perekonomian nasional, semestinya potensi penerimaan zakat di wilayah ini dapat ditingkatkan. Sebagai pembandingan dari potensi dana zakat nasional sebesar 7 Triliun rupiah–realisasi penerimaan LAZ Nasional sebesar 270 Miliar atau sekitar 3,85% (sumber: Republika, 4 Desember 2001). Demikian ditunjukkan pencarian sumber zakat belum optimal baik di wilayah Bandung/Jawa Barat, dan bila lembaga amil zakat mampu menjalankan efektivitas organisasi secara profesional, niscaya kaum muslim memiliki kemampuan pendanaan dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan potensi ekonomi produktif.

6.2 Proses Manajerial Organisasi

Orientasi proses bertujuan menjamin berlangsungnya organisasi melalui penanganan pelayanan konsultasi, komunikasi-informasi program, kesiapan staf pelaksana, serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat. Keberadaan fasilitas kantor serta jumlah staf yang cukup banyak belum menunjukkan adanya aktivitas yang efektif. Diskripsi target Program & Operasional serta mekanisme *Laporan Pemanfaatan* banyak yang belum terukur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa proses manajemen belum mengintegrasikan aktivitas organisasi secara lancar seperti upaya penggalangan muzakki dan mustahik yang kurang aktif⁵ (semi aktif), cenderung menunggu di kantor memanfaatkan respon iklan media massa dan spanduk.

⁵ Perihal kurangnya sifat aktif LAZ dapat diperbandingkan dengan tindakan calon kreditur perbankan atau salesman jasa asuransi.

6.3 Sasaran Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan zakat (ekonomi produktif) dimaksudkan agar organisasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam bahasan zakat sasaran yang dimaksud adalah *bagaiman zakat dapat didayagunakan kepada sasaran delapan Asnaf dengan sebaik-baiknya*. Sejalan dengan Gambar 1 Manajemen Organisasi Zakat maka dibutuhkan dukungan organisasi berupa ketepatan sasaran program yang terukur khususnya dalam teknis pemantauan sasaran manfaat serta umpan balik kondisi mustahik. Kriteria efektivitas seharusnya mampu diuterapkan dalam hal seberapa jauh tercapai peningkatan kesejahteraan mustahik dalam skema rentang waktu yang terukur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa masing-masing organisasi masih mendasarkan kepada prinsip pemerataan bantuan dan belum secara tegas mengarah pada tercapainya perbaikan kondisi dalam rentang waktu yang tertentu.

Terhadap upaya pemecahan sasaran manfaat mengandung pertimbangan bahwa manajemen LAZ harus menjamin tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya untuk selalu diingat bahwa berkaitan dengan orientasi jangka panjang, Islam sebenarnya mengajarkan hal-hal yang lebih dalam. Artinya zakat bukan sekedar kepentingan distribusi konsumsi jangka pendek tetapi juga mengangkat harkat manusia dalam kepentingan jangka panjang sebagai muslimin yang sejahtera.

6.4 Analisis Gabungan

Analisis gabungan input-proses-output atas kinerja penyelenggaraan organisasi zakat menunjukkan:

- Manajemen Organisasi belum menetapkan ukuran (standar) berupa jumlah dan jenis kelompok muzakki potensial pada masing-masing wilayah kerja. Dengan demikian acuan jumlah dana (sumber input) yang harus diperoleh cenderung dilakukan secara taksiran kasar atau metode kira-kira.
- Penyelenggaraan organisasi bersifat semi aktif, dalam arti lebih sering menunggu respon calon muzakki atas publikasi yang bersifat umum (ceramah, brosur, spanduk). Sebagai pembanding organisasi kreditur jasa keuangan atau jasa asuransi jauh lebih aktif. Beberapa lembaga sangat bergantung kepada popularitas tokoh atau jaringan media atau institusi partai yang menaunginya.
- Organisasi belum memiliki acuan waktu yang realistis atas upaya pemberdayaan penyaluran dana, mekanisme evaluasi umpan balik terhadap kelompok mustahik sesuai rentang waktu tertentu belum ditetapkan.

- Mekanisme penyaluran dalam pemberdayaan ekonomi kepada suatu masyarakat tertentu berdasar ukuran volume bantuan belum dilakukan (misal kepada kelompok usaha skala mikro/kecil). Orientasi pemberian bantuan umumnya bersifat pemerataan dalam jumlah rupiah sama untuk ratusan orang, atau sekedar memenuhi fungsi bukti dokumentasi atau publisitas.

7. Kesimpulan

Secara umum kesimpulan menyatakan bahwa: penilaian terhadap efektivitas organisasi lembaga zakat dalam rasio Output per Input tidak tercapai. Organisasi Zakat belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terukur dan terarah. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa manajemen organisasi zakat **tidak boleh ditangani secara sekeadarnya (konvensional)** dan semua perangkat lembaga yang ada perlu diberdayakan secara efektif berdasar prinsip organisasi industri modern. Manajemen zakat pada masa sekarang mensyaratkan profesionalisme berdasar fungsi dan spesialisasi, dengan tujuan akhirnya adalah fungsi produktif zakat benar-benar efektif dalam mengatasi kemiskinan serta mampu menggerakkan roda ekonomi, khususnya bagi kalangan masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Certo, Samuel C., *Strategic Management: A focus on Process*, McGraw-Hill, New York, 1990.
- Lubis, SB. Hari, *Pengantar Teori Organisasi*, Theta Iota, Bandung, 1992.
- Mannan, M Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Miner, John B., *Theories of Organizational Structure and Process*, The Dryden Press, 1982.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor, 1993.
- Potensi zakat 7 Triliun*, Republika 4 Desember 2001.
- Zakat dan Masyarakat*, Jurnal Raushan Fikr, Bandung, 1993.